

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Keterangan
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Program	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	Semua Kota/Kabupaten, semua Kecamatan, semua Kelurahan/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember 2026
Target Keluaran	12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel dan disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alokasi Anggaran 2026	Rp2.044.708.398,00

I. LATAR BELAKANG

Informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta mengatur mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi.

Komisi Informasi provinsi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan tertib, efektif, akuntabel, terdokumentasi, dan mendukung penyelesaian sengketa informasi publik.

Dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 menempatkan sub kegiatan ini pada Program 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kegiatan 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. RKA menetapkan

target keluaran berupa 12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan pelaksanaan Januari sampai dengan Desember dan sumber pendanaan PAD.

Rincian belanja dalam RKA juga menunjukkan kebutuhan dukungan berupa bahan administrasi dan pencetakan, konsumsi kegiatan, honorarium, dukungan tenaga ahli/komisioner, publikasi, pengiriman dokumen, sewa peralatan, serta jasa konsultansi tertentu yang terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan.

Atas dasar tersebut, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026, sehingga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara terarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen penganggaran.

II. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan

- a. Menyediakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola bagi pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- b. Mendukung terselenggaranya proses administrasi, persidangan/penyelesaian sengketa, dokumentasi, publikasi, dan pelaporan secara tertib dan akuntabel.
- c. Menjamin tersedianya dukungan operasional dan tata kelola yang memadai untuk pelaksanaan tugas Komisi Informasi sepanjang Tahun Anggaran 2026.

2.2 Sasaran

- a. Tersedianya dukungan administrasi dan operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- b. Terselenggaranya dukungan keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar biaya yang berlaku.
- c. Terselenggaranya tata kelola, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Komisi Informasi secara tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Tersusunnya 12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah selama Tahun Anggaran 2026.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

3.1 Dukungan Administratif

- a. Penyiapan surat-menyurat, bahan administrasi, penggandaan, pencetakan, pengarsipan, map/dokumen, dan kebutuhan administrasi lainnya.
- b. Penyiapan administrasi kegiatan Komisi Informasi, termasuk dukungan penjangkaran/seleksi apabila menjadi bagian dari pelaksanaan tahun anggaran.
- c. Pengelolaan dan pengiriman dokumen resmi serta dukungan dokumentasi kegiatan.

3.2 Dukungan Keuangan

- a. Penatausahaan dan pemenuhan dokumen pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan.

- b. Fasilitas pembayaran hak/honorarium dan dukungan biaya operasional Komisi Informasi sesuai anggaran dan standar yang berlaku.
- c. Pengendalian penggunaan anggaran agar efisien, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Dukungan Tata Kelola dan Penyelesaian Sengketa

- a. Fasilitas operasional Komisi Informasi dalam menerima, memeriksa, memediasi, dan/atau melakukan adjudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik sesuai kewenangannya.
- b. Penyiapan administrasi persidangan/mediasi, agenda, bahan, dokumen, berita acara, dan dokumentasi hasil penyelesaian sengketa.
- c. Fasilitas koordinasi antara Komisi Informasi, PPID, perangkat daerah, pemohon informasi, termohon, dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.

3.4 Dukungan Kegiatan Keterbukaan Informasi

- a. Fasilitas forum, FGD, asistensi, sosialisasi, peringatan/agenda keterbukaan informasi, dan kegiatan lain yang tercantum dalam dokumen penganggaran.
- b. Dukungan publikasi dan penyebaran informasi kegiatan melalui media yang sesuai.

3.5 Pelaporan dan Dokumentasi

- a. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala dan laporan akhir tahun.
- b. Pengumpulan bukti dukung administrasi, keuangan, keluaran kegiatan, dokumentasi, dan bahan evaluasi.
- c. Penyampaian 12 laporan keluaran sesuai target dalam RKA.

IV. METODA PELAKSANAAN

- a. Perencanaan: melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun rencana kerja, jadwal, kebutuhan administrasi, dan pembagian tanggung jawab.
- b. Koordinasi: melakukan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara serta pihak terkait.
- c. Pelaksanaan: melaksanakan dukungan administrasi, keuangan, tata kelola, fasilitas penyelesaian sengketa, kegiatan keterbukaan informasi, dan kebutuhan operasional sesuai DPA/RKA serta ketentuan yang berlaku.
- d. Dokumentasi: setiap kegiatan didukung dengan dokumen administrasi, daftar hadir bila relevan, notula/berita acara, dokumentasi, bukti transaksi, dan keluaran kegiatan.
- e. Pengendalian: melakukan monitoring atas realisasi fisik dan keuangan, kesesuaian dengan target keluaran, serta tindak lanjut atas permasalahan pelaksanaan.
- f. Pelaporan: menyusun laporan berkala dan laporan akhir, termasuk rekapitulasi capaian 12 laporan keluaran yang ditetapkan dalam RKA.

V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan Desember 2026, sesuai dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026

Tahap	Periode	Keluaran Utama
Persiapan dan perencanaan	Januari 2026	Rencana kerja dan administrasi awal
Pelaksanaan dan dukungan operasional	Januari–Desember 2026	Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola
Monitoring dan evaluasi	Dilaksanakan berkala	Hasil monitoring/evaluasi dan tindak lanjut
Pelaporan	Bulanan/berkala dan akhir tahun	12 laporan keluaran dan laporan akhir

VI. SPESIFIKASI TEKNIS DAN STANDAR KUALITAS

Komponen	Standar Kualitas
Administrasi	Dokumen administrasi harus lengkap, tertib, mudah ditelusuri, menggunakan format kedinasan, dan disimpan sesuai sistem pengarsipan yang berlaku.
Keuangan	Setiap belanja harus didukung bukti yang sah, sesuai pagu, kode rekening, standar harga/biaya yang berlaku, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen sengketa	Dokumen terkait penyelesaian sengketa harus tersusun secara sistematis, lengkap, aman, dan mendukung proses mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
Pelaporan	Laporan memuat realisasi kegiatan, capaian keluaran, permasalahan dan tindak lanjut, serta bukti dukung yang relevan.
Kualitas keluaran	Keluaran harus akuntabel, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan konsisten dengan target sub kegiatan, yaitu 12 laporan.
Publikasi	Materi publikasi harus sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, akurat, tidak menyesatkan, dan memperhatikan informasi yang dikecualikan.

VII. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan adalah wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan cakupan sebagaimana tercantum dalam RKA yaitu semua kota/kabupaten, semua kecamatan, dan semua kelurahan/desa. Pelaksanaan administratif dan koordinasi utama dilaksanakan pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara serta lokasi lain sesuai kebutuhan kegiatan dan kewenangan Komisi Informasi.

VIII. SUMBER PENDANAAN

Sub kegiatan dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen RKA mencantumkan alokasi Tahun 2026 sebesar Rp2.044.708.398,00.

Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai DPA/DPPA yang berlaku, ketentuan pengelolaan keuangan daerah, standar harga satuan yang berlaku, serta prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Rincian belanja RKA antara lain mencakup belanja barang, bahan cetak, konsumsi kegiatan, jasa/honorarium, jasa tenaga ahli, publikasi, pengiriman, sewa, dan jasa konsultasi sesuai kebutuhan yang telah dianggarkan.

IX. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai hak memperoleh informasi.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar hak memperoleh informasi publik, kelembagaan Komisi Informasi, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Peraturan ini ditetapkan 19 Januari 2026 dan mulai berlaku 2 Februari 2026 serta mencabut Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
- e. Peraturan Komisi Informasi yang mengatur standar layanan/penyelesaian sengketa informasi publik sepanjang masih berlaku dan relevan dengan pelaksanaan tugas Komisi Informasi.
- f. Peraturan daerah/peraturan gubernur Provinsi Sumatera Utara yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, tata kerja perangkat daerah dan/atau penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sepanjang berlaku pada Tahun Anggaran 2026.
- g. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan 2.16.02.1.01.0020 sebagai dasar perencanaan keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran.

X. INDIKATOR KINERJA DAN KELUARAN

Jenis	Indikator/Tolok Ukur	Target 2026
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.044.708.398,00
Keluaran	Jumlah laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 laporan
Waktu	Pelaksanaan sub kegiatan	Januari–Desember 2026
Sumber dana	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun Anggaran 2026

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen penganggaran yang berlaku.

Apabila terdapat perubahan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dokumen penganggaran selama Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketentuan yang berlaku tanpa mengubah tujuan dan keluaran utama sub kegiatan.

Medan, Februari 2026

KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



PORMAN JUANDA MARPOMARI MAHULAE, ST, M.Si
NIP. 19800915 201001 1 015

**REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN
KABUPATEN KOTA PEMERINTAH KABUPATEN**

Pemerintah Kabupaten (Kota)
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMULIR
DOKUMEN INDIKATOR KEGIATAN

Kecamatan (Kode) : 102 10 2 20 2 21 01 000001/2020

Uraian Kegiatan : 2 - LOKUSAN PEMERINTAHAN WALAH YANG TIDAK MENCAKUPKAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Uraian : 2 10 - LOKUSAN PEMERINTAHAN BIKASIS KOMUNIKASI (SAS) INFORMATIKA
 Program : 2 10.02 - PROGRAM PENGELUARAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Kegiatan : 2 10.02.1.01 - PENGELUARAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI)
 Organisasi : 2 10.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
 Unit : 2 10.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
 Alokasi Tahun -1 : Rp0.00
 Alokasi Tahun : Rp1.963.780.198,00
 Alokasi Tahun + 1 : Rp2.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.963.780.198,00
Keluaran	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 Laporan
Hasil		

Sub Kegiatan : 2.10.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.963.780.198,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.963.780.198,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.963.780.198,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp127.500.198,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp127.500.198,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp1.837.440,00
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.837.440,00
	[-] Bahan Pembersih					Rp1.837.440,00
	SABUN CAIR Spesifikasi: -	24 Botol	Botol	Rp58.000,00	0%	Rp1.392.000,00
	SABUN CUCI TANGAN Spesifikasi: CAIR	24 Buah	Buah	Rp18.560,00	0%	Rp445.440,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp9.780.470,00
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.470,00
	[-] Bahan Pembersih					Rp30.470,00
	WIPOL KARBOL REFILL 780 ML Spesifikasi: -	1 Buah	Buah	Rp30.470,00	0%	Rp30.470,00
	[#] Bingkai Piagam Monev KIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.750.000,00
	[-] Bingkai Piagam Monev KIP					Rp9.750.000,00
	BINGKAI FOTO Spesifikasi: 12R	65 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp9.750.000,00

Kode	Uraian	Rincian Pembelian				Jumlah (Rp)
		Kuantitas / Volume	Satuan	Harga	PPh	
01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.165.200,00
	[#] Amplop Komisi Informasi					Rp2.640.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Amplop Komisi Informasi					Rp2.640.000,00
	AMPLOP PUTIH NO 90	60 Pak	Pak	Rp44.000,00	0%	Rp2.640.000,00
	Spesifikasi: -					
	[#] Belanja ATK Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu					Rp8.125.200,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja ATK Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu					Rp8.125.200,00
	KERTAS HVS A4 70 GR	140 Rim	Rim	Rp58.000,00	0%	Rp8.120.000,00
	Spesifikasi: -					
	PAPER KLIP NO.3, ATOM	1 Kotak	Kotak	Rp5.200,00	0%	Rp5.200,00
	Spesifikasi: -					
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp43.385.088,00
	[#] Bahan Cetak					Rp38.710.288,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Bahan Cetak					Rp38.710.288,00
	Biaya Foto Copy HVS	5652 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.978.200,00
	Spesifikasi: -					
	CETAK BUKU	200 Eksemplar / Buku	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp10.000.000,00
	Spesifikasi: BUKU					
	CETAK KOP SURAT BERLAMBAK	10 Rim	Rim	Rp130.000,00	0%	Rp1.300.000,00
	Spesifikasi: KERTAS A4					
	Cetak Laporan	50 Eksemplar	Eksemplar / Buku	Rp300.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Spesifikasi: -					
	CETAK MAP BERLAMBAK	358 Lembar	Lembar	Rp8.436,00	0%	Rp3.020.088,00
	Spesifikasi: -					
	Cetak Piagam	100 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Spesifikasi: -					
	Cetak Spanduk	6 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Spesifikasi: ukuran 1 x 6 m					
	CETAK UNDANGAN KEGIATAN (BESAR)	20 Lembar	Lembar	Rp15.600,00	0%	Rp312.000,00
	Spesifikasi: CETAK UNDANGAN					
	[#] Belanja Cetak Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu					Rp4.674.800,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Cetak Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu					Rp4.674.800,00
	Biaya Foto Copy HVS	3000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.050.000,00
	Spesifikasi: -					
	CETAK AMPLOP BERLOGO	232 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp232.000,00
	Spesifikasi: -					
	CETAKAN SPANDUK UKURAN 1 X 6 M	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00
	Spesifikasi: UKURAN 1 X 6 M					
	CETAK MAP KARTON MANILA TEBAL BERLOGO	106 Lembar	Lembar	Rp18.800,00	0%	Rp1.992.800,00
	Spesifikasi: -					
	Jilid Spiral, Pakai Plastik, Folio	20 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00
	Spesifikasi: -					
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp22.500.000,00
	[#] Belanja Cenderamata					Rp22.500.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Cenderamata					Rp22.500.000,00
	CENDERAMATA - PLAKAT	15 Buah	Buah	Rp1.500.000,00	0%	Rp22.500.000,00
	Spesifikasi: -					
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp2.232.000,00
	[#] Belanja Minuman Jamuan Tamu					Rp2.232.000,00
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-] Belanja Minuman Jamuan Tamu					Rp2.232.000,00

Kode	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Cup Spesifikasi:	24 Dus	Dus	Rp43.000,00	0%	Rp1.032.000,00
	AIR MINERAL GALON Spesifikasi: -	48 Galon	Galon	Rp25.000,00	0%	Rp1.200.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.000.000,00
	[#] Asistensl Keterbukaan Informasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.250.000,00
	[-] Asistensl Keterbukaan Informasi					Rp4.250.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	250 Orang / Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp4.250.000,00
	[#] Belanja makan dan minm Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.500.000,00
	[-] Belanja makan dan minm Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provsu					Rp11.500.000,00
	Nasi Kotak Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp47.000,00	0%	Rp4.700.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	400 Kotak	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp6.800.000,00
	[#] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.700.000,00
	[-] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi					Rp1.700.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	100 Orang / Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.000.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	1000 Orang / Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp17.000.000,00
	[#] Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.000,00
	[-] Peringatan Hari Keterbukaan Informasi					Rp2.550.000,00
	Snack Kotak Spesifikasi: -	150 Orang / Kali	Kotak	Rp17.000,00	0%	Rp2.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.836.280.000,0
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp1.833.780.000,0
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp293.800.000,0
	[#] Biaya ujian psikotes calon anggota KI Provsu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp71.400.000,0
	[-] Biaya ujian psikotes calon anggota KI Provsu					Rp71.400.000,0
	Honorarium Narasumber / Moderator / Pembawa Acara Profesional - Honorarium Narasumber Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional - Perpres 72	42 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp71.400.000,0
	[#] Biaya uji kepatuhan dan kelayakan calon anggota KI Provsu oleh komisi A Kegiatan Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp68.000.000,0
	[-] Biaya uji kepatuhan dan kelayakan calon anggota KI Provsu oleh komisi A Kegiatan Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara					Rp68.000.000,0
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia - Honorarium Narasumber/ Pembahas - Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional - Perpres 72	68 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp68.000.000,0
	[#] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.700.000,00
	[-] FGD Penyusunan Ranperda Keterbukaan Informasi					Rp6.700.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia - Honorarium Moderator Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional - Perpres 72	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp146.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Seleksi Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumut					Rp146.000.000,00

Uraian	Rincian Pertimbangan				Jumlah (Rp)
	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPH	
Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia - Honorarium Narasumber/ Pembahas - Eselon II / yang diselenggarakan Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional - Perpres 72	146 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp146.000.000,00
[#] Penganugerahan Money KIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00
[-] Penganugerahan Money KIP					Rp1.700.000,00
Honorarium Narasumber / Moderator / Pembawa Acara Profesional - Honorarium Narasumber Spesifikasi: Standar Harga Satuan Regional - Perpres 72	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.700.000,00	0%	Rp1.700.000,00
5.1.02.02.001.00029 Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp1.432.880.000,00
[#] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provsu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.432.880.000,00
[-] Gaji Ke-13 Komisiner Komisi Informasi Provsu					Rp77.440.000,00
Gaji ke-13 Komisiner KI Provsu Spesifikasi: -	5 Orang / Kali	Orang	Rp15.488.000,00	0%	Rp77.440.000,00
[-] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provsu-Anggota					Rp486.000.000,00
Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Anggota Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500.000,00	0%	Rp486.000.000,00
[-] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provsu- Ketua					Rp162.000.000,00
Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Ketua Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500.000,00	0%	Rp162.000.000,00
[-] Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provsu- Wakil Ketua					Rp162.000.000,00
Honorarium Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara - Wakil Ketua Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500.000,00	0%	Rp162.000.000,00
[-] THR Komisiner KI Provsu					Rp77.440.000,00
THR Komisiner KI Provsu Spesifikasi: -	5 Orang	Orang	Rp15.488.000,00	0%	Rp77.440.000,00
[-] Tunjangan Jabatan Anggota KIP					Rp72.000.000,00
Tunjangan Jabatan Anggota KIP Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang	Rp2.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00
[-] Tunjangan Jabatan Wakil Ketua KIP					Rp30.000.000,00
Tunjangan Jabatan Wakil Ketua KIP Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang	Rp2.500.000,00	0%	Rp30.000.000,00
[-] Tunjangan Jabatan Ketua KIP					Rp36.000.000,00
Tunjangan Jabatan Ketua KIP Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
[-] Tunjangan Kesra Anggota KIP					Rp198.000.000,00
Tunjangan Kesra Anggota KIP Spesifikasi: -	36 Orang / Bulan	Orang	Rp5.500.000,00	0%	Rp198.000.000,00
[-] Tunjangan Kesra Ketua KIP					Rp66.000.000,00
Tunjangan Kesra Ketua KIP Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang	Rp5.500.000,00	0%	Rp66.000.000,00
[-] Tunjangan Kesra Wakil Ketua KIP					Rp66.000.000,00
Tunjangan Kesra Wakil Ketua KIP Spesifikasi: -	12 Orang / Bulan	Orang	Rp5.500.000,00	0%	Rp66.000.000,00
5.1.02.02.001.00055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp100.000.000,00
[#] Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak Kegiatan Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000.000,00
[-] Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak Kegiatan Penjaringan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara					Rp100.000.000,00
Iklan di Surat Kabar Harian lain-lain (Full Colour) Spesifikasi: -	6 Per Halaman	Per Halaman	Rp10.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
Iklan di Surat Kabar Harian lain-lain Spesifikasi: -	8 Lembar	Lembar	Rp5.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00
5.1.02.02.001.00064 Belanja Paket/Pengiriman					Rp7.100.000,00
[#] Pengiriman Surat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.100.000,00

Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
[-] Pengiriman Surat					Rp7.100.000,00
Paket Pos Ekspres (Dokumen) Spesifikasi:	200 Buah	Buah	Rp35.500,00	0%	Rp7.100.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.500.000,00
[#] Dekorasi Penganugerahan Monev KIP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000,00
[-] Dekorasi Penganugerahan Monev KIP					Rp2.500.000,00
Sewa Dekorasi Stand Pameran Spesifikasi: -	1 M2	M2	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.963.780.198,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp125.389.120,00
Februari	Rp500.080.394,00
Maret	Rp199.468.220,00
April	Rp118.349.120,00
Mei	Rp108.114.120,00
Juni	Rp192.988.360,00
Juli	Rp109.763.220,00
Agustus	Rp111.273.360,00
September	Rp159.651.120,00
Oktober	Rp109.274.120,00
November	Rp107.589.924,00
Desember	Rp121.839.120,00
Jumlah	Rp1.963.780.198,00

Medan, tanggal 23 Januari 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Dr. ERWIN HOTMANSAH HARAHAP, S.STP, MM
NIP. 197612081996021001

Mengesahkan,
PPKD

H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M. AP
NIP. 197312111993031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Fasilitas Sarana dan prasarana Komisi Informasi



Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara



Ruang Sidang KI Provsu



Ruang Komisioner KI Provsu



Ruang Registrasi



Ruang PSI



Ruang Komisioner KI Provsu